

GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF GRAMSCI**Yotam Senis****Abstrak*

Kapitalisme adalah satu pola pandang manusia terhadap kegiatan ekonomi, yang mana pertumbuhannya tidak selalu menuju kearah positif seperti yang bayangkan oleh kebanyakan orang. Kritik terhadap keberadaan kapitalis sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat kelas bawah adalah salah satu faktor yang menyebabkan aliran ini dikritik. Namun, tidak hanya kritik yang mengancam kapitalisme, tetapi juga ideologi lain yang ingin menghilangkannya, seperti komunisme.

Kapitalisme atau Capital adalah suatu paham yang percaya bahwa pemilik modal dapat melakukan upaya untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Prinsip yang paling mendasar adalah bahwa pemerintah tidak bisa campur tangan dalam rangka untuk mencapai pasar bersama-sama, namun intervensi pemerintah hanya akan membuat keuntungan besar bagi kepentingan pribadi. Oleh sebab itu kapitalisme tidak benar-benar memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas.

Kata Kunci : Globalisasi, Kemiskinan, Gramsci

GLOBALIZATION AND POORNESS IN PAPUA IN IS IN PERPECTIVE OF GRAMSCI.**Yotam Senis****Abstrak*

Capitalism is one of the patterns of human perspective in all economic activities. Its growth does not always move toward positive as many people imagine, but up and down. Critique of capitalist existence as a form of oppression of the lower classes of society is one of the factors that cause this flow has been criticized. However, not only criticism that threaten capitalism but also other ideologies that want to eliminate it, like communism.

Capitalism or Capital is an understanding which believes that capital owners can make an effort to achieve maximum profit. For the sake of principle, the government can not intervene in order to gain market together, but government intervention made massive profits personal interests. However, capitalism does not really have a universal definition that can be widely accepted.

Keyword: Globalization, Poorness, Gramsci

A.Pendahuluan

Pulau Papua adalah sebuah wilayah dengan luasan mencapai ±710.937 km², dan ±410.660 km² diantaranya adalah daratan, dengan morfologi hutannya menghampar luas. Antara Papua dan Papua New Guinea jika digabung maka hutan Papua terhitung nomor dua terbesar di dunia setelah Amazon. Terdapat 312 suku asli yang mendiami pulau Papua dengan bahasa dan dialek

masing-masing yang khas, tercatat 15% dari seluruh bahasa yang ada di dunia ini dimiliki oleh suku-suku asli di Papua. Bentuk-bentuk kreasi seni dan budaya orang Papua pun sangat beragam sesuai etnik mereka. Dalam keberadaan dan perbedaan suku, bahasa dan budaya namun orang Papua masih memiliki kesamaan ras dalam suku-suku besar yang mencakup beberapa

* Yotam Senis adalah Dosen pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNCEN

suku-suku kecil. Dengan perbedaan itu namun orang Papua tetap hidup dalam hubungan satu sama lain dalam keharmonisan.

Sejak berintegrasinya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, status politik dan keabsahannya menjadi satu masalah yang hingga saat ini dipersoalkan oleh masyarakat Papua dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam urutan sejarah tahun 1961, oleh Pemerintah Kerajaan Belanda memproklamkan kemerdekaan Bangsa Papua. Namun oleh Pemerintah Indonesia saat itu menganggap bahwa hal itu sebagai trik politik Belanda untuk tetap mempertahankan Papua sebagai daerah koloninya. Sehingga oleh Jendral Soeharto saat itu memerintahkan Yos Sudarso sebagai Komanda Pembebasan Irian Barat dalam Operasi Militer yang dinamakan TRIKORA. Tahun 1969 Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sebagai langkah penentuan status politik Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sah sebab dilakukan berdasarkan penentuan pendapat rakyat. Namun bagi kalangan Orang Papua lain menganggap bahwa pelaksanaan PEPERA tidak demokratis. Pandangan tersebut kemudian menghadirkan konflik berkepanjangan dan hingga kini status politik Papua menjadi isu HAM yang belum terselesaikan.

Berbagai gerakan menentang hasil integrasi tersebut terus berlangsung, dimana oleh masyarakat merasa bahwa hasil PEPERA bukan suara mereka. Dengan hasil PEPERA yang demikian menciptakan situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif. Sejak

saat itu terjadi gerakan penentangan integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini makin mencapai puncaknya tatkala Indonesia dipimpin oleh pemerintahan tangan besi.

Berakhirnya rezim orde lama dan dimulainya rezim orde baru, masyarakat Indonesia terbungkam dalam sangkar besi, dimana demokrasi untuk menyampaikan pendapat dianggap sebagai separatisme. Dengan sebuah rezim militer, roda pemerintahan di Indonesia sebagai pemerintahan bertangan besi. Rakyat dianggap sebagai pemberontak apabila mencoba untuk menyampaikan pendapat. Tidak adanya kebebasan menyampaikan pendapat adalah merupakan ciri khas dari rezim orde baru. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dianggap sebagai upaya melindungi kedaulatan NKRI.

Berbagai gerakan masyarakat Papua sebagai upaya menyampaikan aspirasi dianggap sebagai gerakan separatis yang menentang Konstitusi NKRI. Gerakan-gerakan tersebut kemudian oleh TNI menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Penetapan status Papua sebagai daerah operasi militer mengakibatkan penyempitan ruang gerak pembangunan. Sebab yang terjadi bahwa adanya sebuah pertikaian (konflik) antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat menuntut pemerataan dalam pembangunan namun oleh pemerintah saat itu dianggap sebagai pemberontakan. Sejak saat itu kondisi Papua tidak mengalami kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan layaknya daerah-daerah lain di Indonesia.

Seiring dengan Papua sebagai daerah operasi militer, masyarakat semakin terisolasi dan terputus dari semua akses baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Kesenjangan sosial antara daerah pegunungan dan daerah pantai semakin tinggi tatkala sering terjadi gejolak dan lebih sering terjadi di daerah pegunungan. Keterlambatan pembangunan itulah yang kemudian memunculkan konflik sosial dan terkadang konflik tersebut oleh penguasa dianggap sebagai gerakan perlawanan terhadap negara.

Pada pertengahan tahun 1997 ditandai dengan perlawanan rakyat Indonesia untuk menggulirkan rezim orde baru seolah terbuka cakrawala baru bagi Orang Papua. Rakyat Indonesia dengan bebas menyampaikan aspirasi di alam demokrasi yang terbuka pasca bergulirnya rezim orde baru. Secara khusus bagi rakyat Papua melalui Tim 100 menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui Presiden B.J Habibie pada saat itu. Namun aspirasi tersebut terjawab setelah pemerintahan di pimpin oleh alm. KH. Abdurahman Wahid dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Hingga era reformasi, konflik Papua masih tetap menjadi isu politik di negara ini. Sebab yang ada bahwa masyarakat merasa belum puas dengan hasil pembangunan yang dijalankan selama integrasinya Papua ke dalam NKRI. Menurut Pernyataan Ketua MRP Pdt. Agus Alua, S. Th “bahwa otonomi khusus di nilai gagal, sebab otonomi belum meningkatkan kesejahteraan orang Papua”. Dengan bergulirnya reformasi pada pertengahan tahun 1997 merupakan awal dimana terbukanya

cakrawala baru bagi orang Papua untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas dan terbuka.

Kondisi yang berbeda terjadi tatkala keputusan politik yang memutuskan penyatuan Tanah Papua (disebut pada waktu itu dengan nama *Nederlands Nieuw Guinea*) kedalam bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesiapada tahun 1963. Namun ternyata keputusan politik tersebut masih belum dapat menaikkan tingkat kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan Negara Indonesia terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Keterbelakangan dan keterisolasian membuat kondisi masyarakat Papua secara ekonomi, sosial politik dan budaya masih sangat memprihatinkan. Keadaan ini sangat jauh berbeda dan mencolok dibandingkan dengan keadaan kesejahteraan yang dinikmati oleh sebagian besar saudara-saudaranya di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya secara kasat mata masih terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hal ini diindikasikan oleh adanya pengingkaran hak kesejahteraan rakyat Papua. Kesemua masalah-masalah kemanusiaan yang mendasar ini hingga saat ini masih belum ditangani dan diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Berbagai konflik politik yang terjadi hingga saat ini merupakan suatu peninggalan sejarah yang belum terselesaikan secara tuntas oleh masyarakat Papua dan Pemerintah Republik Indonesia. Bila ditinjau lebih

spesifik, berbagai konflik yang terjadi di Papua dapat di urutkan dalam dua masa penyebab terjadinya konflik. Pada periode pertama terjadi pelanggaran HAM pada hak-hak sipil dan politik rakyat Papua. Pada dasarnya kondisi politik di Papua menggambarkan dua isu utama dalam menyikapi beberapa masalah yang terjadi saat ini, yaitu Pertama yaitu tuntutan orang Papua bahwa perlu adanya dialog pelurusan sejarah dan adanya pengakuan Pemerintah Indonesia atas eksistensi (adat dan budaya) Orang Asli Papua. Kedua keseriusan Pemerinta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan tuntutan Orang Papua. Kedua hal itu jika diurutkan kembali dalam rentetan sejarah peradaban Orang Papua akan lebih memberikan gambaran yang lebih jelas dalam menyikapi konflik sosial politik di Papua. Sebab perkembangan peradaban orang Papua yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari peran kekuatan kapitalis dalam menciptakan kondisi sosial politik untuk menentukan eksistensi orang Papua.

Pada periode OTSUS muncul bentuk pelanggaran HAM pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi ini ditandai dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang menjadi tuntutan dominan adalah berkaitan dengan hak mendapatkan perbaikan dan peningkatan kondisi ekonomi yang baik, pendidikan, kesehatan dan sarana-prasarana yang layak. Keterbelakangan dan keterisolasian masyarakat dalam pembangunan menjadi alasan utama untuk mengangkat kembali isu-isu sosial politik sebagai bentuk penuntutan

terhadap hak-hak hidup orang Papua. Seperti yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini dimana terjadi penggugatan terhadap PT Freeport Indonesia dan tuntutan Orang Papua atas kegagalan OTSUS yang berujung kepada isu tuntutan merdeka.

Tetapi juga terjadi pelanggaran HAM bagi kelompok minoritas seperti kaum perempuan, kelompok pedagang pribumi (mama-mama Papua), dan kelompok agama dan kelompok adat. Dalam penegakan hukum peradilan, akses bagi masyarakat untuk mendapat keadilan hukum masih terbatas.

B. Hegemoni Amerika

Istilah “hegemoni” pertama kali digunakan di Rusia pada tahun 1890 – 1917 sebagai slogan gerakan Sosial Demokrat Rusia dalam revolusi Bolshevik menggulingkan Tsar Nicolai II. Dalam perkembangannya istilah hegemoni yang kemudian oleh Gramsci seorang pemimpin revolusi dari Italia menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan hubungan persoalan ekonomi dengan kemampuan institusi superstruktur dalam mencapai/mempertahankan kekuasaan. Bagi Gramsci hegemoni merupakan bentuk pola ekonomi yang berbahaya terutama dominasi kaum borjuis terhadap pekerja sehingga terjadi kesenjangan sosial, ekonomi dan politik.

Slogan hegemoni kemudian berkembang menjadi satu sistem ideologi ekonomi global pasca perang dunia kedua. Sebab pada masa itu terjadi persaingan ideologi dua negara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pertarungan gengsi atas keberhasilan mereka meruntuhkan

kejayaan Jerman dan sekutunya. Kedua negara superpower ini memiliki perbedaan ideology antara sosialis dan liberal dan saling berambisi menjadi hegemoni utama dalam tatanan dunia baru pasca perang. Namun dalam persaingan tersebut Amerika tampil menjadi pemenang tunggal dalam persaingan hegemoni sebab pasca perang dunia kedua, kondisi ekonomi Amerika masih lebih stabil dibandingkan dengan Uni Soviet. Menguatnya hegemoni Amerika lebih eksis tatkala kondisi ekonomi Inggris yang mulai melemah setelah kehilangan kemampuan hegemoninya mengatur perekonomian dunia di akhir abad kesembilan belas akibat persoalan keuangan dalam negerinya pasca Perang Dunia Pertama. Begitu pula dengan kondisi ekonomi perekonomian Jerman dan Jepang pun sama lemahnya pasca perang.

Sebagai langkah awal dan menyikapi perubahan kondisi ekonomi dunia, Amerika yang tampil sebagai hegemoni kemudian mengeluarkan kebijakan baru dalam menata sektor perekonomian dan moneter serta perdagangan. Sebagai bentuk respons awal Amerika Serikat mencetuskan ide hegemoninya kedalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 44 negara di Desa Bretton Woods dan menghasilkan "Bretton Woods System". Sebagai kelanjutan dari pertemuan Bretton Woods kemudian dibentuklah sebuah lembaga yang mengontrol pengaturan nilai tukar dan ketidakseimbangan dalam pembayaran antar negara yang disebut International Monetary Found (IMF). Ketidakseimbangan pembayaran antar negara ini disebabkan karena di

beberapa negara Eropa terjadi devisa cadangan anggaran dan belanja negara sehingga IMF merasa perlu untuk mensupport cadangan devisa negara-negara Eropa sehingga Amerika kemudian membentuk World Bank. Selain itu Amerika juga mengusahakan dijalkannya *free market* atau yang lebih dikenal dengan pasar bebas guna menciptakan keseimbangan ekonomi antara Amerika dan Eropa dan dibentuklah World Trade Centre (WTO).

Awalnya, kehadiran institusi-institusi perekonomian tersebut ditujukan untuk membantu restrukturisasi ekonomi negara-negara Eropa yang secara ekonomi carut marut akibat perang. Namun kemudian tujuan tersebut dalam penerapannya semakin bergeser ke arah perluasan hegemoni Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya sejumlah usaha lain Amerika Serikat dalam mengontrol komoditas penting perekonomian dunia, misalnya minyak. Presiden Nixxon harus mengambil kebijakan floating-exchaged rated system terhadap nilai tukar dollar untuk menyelamatkan cadangan emas AS. Hal ini menandai berakhirnya "Bretton Woods System" sekaligus melemahnya hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian internasional seiring adanya defisit neraca perdagangan dalam negeri AS di tahun 1970-an. Inilah awal munculnya globalisasi (pasar bebas) sebagai babak baru bergulirnya sistem ekonomi dunia yang dipelopori Amerika dan sekutunya.

C. Pepera Sebagai Langkah Awal Kapitalisme di Papua.

Setelah berakhirnya perang dunia ke II antara Amerika dan Jepang yang

menimbulkan inflasi besar di Amerika menjadikan negara adidaya tersebut menjalankan trik ekonomi barunya dengan mencoba menguasai ekonomi Asia. Lawan tanding ekonomi Asia adalah Jepang telah dilumpuhkan oleh Amerika. Namun sisa-sisa paham ekonomi sosialis masih merajalela di Asia dan China menjadi salah satu negara yang menganut ideology tersebut. Sosialis kemudian berkembang hingga masuk ke Filipina dan terakhir masuk ke Indonesia.

Pada tanggal 15 Desember 1945 sesudah kapitalisme Jepang, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, namun Belanda tetap menyampaikan penolakannya atas kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dikarenakan munculnya berbagai ancaman masalah serius di dunia internasional. Dalam pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia, Papua Barat pada saat itu tidak disertakan dalam bagian wilayah Indonesia yang diakui. Namun kemudian muncul persyaratan yang mengharuskan adanya penyelesaian status Papua dalam waktu satu tahun.

Namun dalam persoalan tarik ulur masalah Papua, Indonesia dan Belanda sebenarnya ini merupakan satu trik politik kuat yang dimanikan oleh Presiden Soekarno pada saat itu melalui politik ekspansi wilayahnya. Dengan bantuan Uni Soviet, Amerika jadi mempertimbangkan kerja samanya antara Amerika-Inggris dan Belanda dalam menaklukkan Jepang pada perang dunia ke II. Sebab kekhawatiran Amerika pada saat itu dengan adanya

ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Ketika Amerika harus memihak kepada Belanda adalah sebagai pemicu kemungkinan munculnya perang dunia ke tiga.

Kekhawatiran itu muncul apabila Belanda mengirim pasukan marinir dan pesawat tempurnya ke Papua yang berujung pada pecahnya perang antara Belanda dan Indonesia dalam memperebutkan Papua. Kondisi ini secara pasti akan mendesak China memihak kepada Indonesia begitu pula Uni Soviet dan Blok Timurnya karena itulah yang menjadi pintu masuknya ideologi sosialis di Indonesia. Namun di sisi lain Belanda yang juga merupakan anggota Pakta NATO, yang dalam piagam NATO apabila salah satu anggota dilanda peperangan maka itu merupakan perang terhadap NATO secara keseluruhan. Kondisi ini kemudian oleh Presiden Jhon F. Kenedy mengambil tindakan guna menghalangi pecahnya perang dengan mengundang Presiden Soekarno ke Amerika untuk membicarakan masalah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan satu jejak penentuan pendapat rakyat yang akan di tengah oleh PBB. Pertemuan tersebut selanjutnya dibawa ke pertemuan resmi yang kemudian melahirkan New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962. Namun pada kesempatan yang sama juga ditandatangani kontrak karya PT. FreePort Mac Moran sebagai mesin kapitalis Amerika dalam ekspansi ekonominya di Asia Tenggara. Pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda secara resmi menyerahkan Papua dalam kendali PBB dengan membentuk UNTEA. UNTEA kemudian mempersiapkan Papua untuk diserahkan

kepada Indonesia dan pada tanggal 1 Mei 1963 Papua resmi masuk ke NKRI. Namun dengan persyaratan bahwa 6 tahun setelah itu akan diadakan PEPERA sebagai bentuk pernyataan status Papua dalam NKRI.

Sebelum PEPERA dilakukan secara sah, PT. FreePort Mc Moran sudah mulai menjejak eksplorasi di Timika Papua. Atas dasar kepentingan kapitalis inilah yang mendorong dukungan kuat Amerika dalam menganulir hasil PEPERA 1 Juli 1969 sehingga kepentingan ekspansi ekonominya di Asia Tenggara dan perluasan paham komunis diputuskan agar tidak merambat ke seluruh Asia Tenggara.

D. Kemiskinan Di Papua

Isu kemiskinan saat ini merupakan fenomena sosial yang dihadapi setiap negara terutama di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, namun garis besarnya lebih menitik beratkan pada kenyataan dimana ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Kategori penduduk miskin bukan saja pada masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah tetapi cakupan kategori kemiskinan dapat diperluas pada beberapa aspek lain. Beberapa aspek lain yang dimaksud adalah kondisi buruk dalam hal kesehatan, pendidikan, perubahan perilaku (budaya) dan aspek lainnya sebagai manusia. Program penanggulangan kemiskinan ini menjadi komitmen bersama antara Indonesia dengan Negara-negara anggota PBB

yang tertuang dalam deklarasi MDGs (Millennium Development Goals). Target pertama dari MDGs adalah menurunkan proporsi penduduk miskin hingga setengahnya antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2015.

Isu kemiskinan selalu mengikuti trend pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari berjalannya roda pembangunan. Di Indonesia pembangunan menjadi peran sentral dalam pengentasan kemiskinan, dan pembangunan juga merupakan sebuah metode untuk mencapai Millennium Development Goals. Untuk mencapai MDGs dalam rangka menurunkan proporsi penduduk miskin maka diperlukannya keterpaduan antara pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Namun di Indonesia masih dikenal dengan pembangunan terdistorsi atau belum tersinkronkan antara pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Pembangunan di Indonesia masih didominasi oleh pembangunan ekonomi dan tidak terlepas dari peran kapitalis sebagai pemilik modal.

Pasca integrasi Papua kedalam NKRI dan penandatanganan kontrak karya FreePort Mc Moran di Papua, hal itu dijadikan sebagai langkah awal kapitalisasi ekonomi di Papua. Berbagai sumber daya alam mulai dieksploitasi; pertambangan, kekayaan hasil hutan, hasil kekayaan laut dan semua prosepek pertumbuhan ekonomi dikuasi oleh para kapitalis dan elit politik sebagai mesin kapitalis. Papua merupakan sebuah wilayah yang sangat subur dan melimpah dengan kekayaan alam serta tambang yang luar biasa melimpah, namun rakyat Papua masih hidup dibawah garis kemiskinan,

kebodohan, sangat primitif dan keterisolasian.

Secara teori, berdasarkan faktor penyebabnya kemiskinan bisa dikategorikan dalam dua hal, yakni kemiskinan Struktural dan kemiskinan Alamiah. Kemiskinan Struktural atau bisa disebut *Man made poverty*, adalah kondisi kemiskinan yang lebih disebabkan oleh struktur sosial yang ada yang mencakup tatanan organisasi dan aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan Kemiskinan Alamiah banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Untuk Papua, kemiskinan struktural adalah salah satu faktornya sebagai akibat dari pejabat yang korup, terjadinya kolusi, nepotisme serta diskriminasi. Status otonomi khusus dan otonomi daerah yang diterapkan di Papua sama sekali tidak membawa dampak signifikan, kecuali hanya memperkaya beberapa individu pejabat yang mabuk dengan banyaknya dana OTSUS. Padahal untuk Papua nilai APBD yang dikucurkan adalah yang terbesar ke dua di Indonesia. Sedangkan kondisi kemiskinan yang lain adalah kualitas sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan masyarakat Papua dapat dibilang masih primitif, tidak tersentuh peradaban dan tidak mengenal teknologi. Meskipun alam Papua bagai surga dunia yang melimpah ruah dengan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam, namun tidak ditunjang dengan sumberdaya manusia yang sangat rendah mustahil mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Dan kenyataan yang terjadi saat ini adalah penindasan hak rakyat Papua,

perampokan kekayaan dan pembodohan.

Pada tulisan ini penulis mencoba untuk memaparkan data kemiskinan daerah-daerah di Papua mulai dari tahun 2005 hingga 2010. Dalam data yang tercatat pada BPS tahun 2005 tercatat daerah-daerah miskin di Papua sekitar 1.028.2 (dalam hitungan ribuan) dan pada tahun 2006 tercatat penduduk yang miskin sekitar 816.7 (dalam hitungan ribuan), dan pada tahun 2007 tercatat sekitar 793.4 (dalam hitungan ribuan), pada tahun 2008 tercatat sekitar 793.4 (dalam hitungan ribuan) dan pada tahun 2009 sekitar 760.3 (dalam hitungan ribuan) dan pada tahun 2010 tercatat sekitar 761.6 (dalam hitungan ribuan). Walaupun dalam data BPS tercatat ada penurunan angka kemiskinan di Papua namun kesenjangan sosial masih saja terjadi dan hal ini belum tentu merubah status Papua sudah terbebas dari kemiskinan, sebab dalam angka yang tercatat pada tahun 2009 masih dikatakan tinggi untuk ukuran Indonesia.

Hingga program RESPEK dijalankan namun stigma kemiskinan di Papua belum dapat dihilangkan. Hal ini terbukti dari capaian 10 tahun terakhir dengan menunjuk pada angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua, sebab program *pro poor* yang dijalankan malah menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan-bantuan yang ada. Seperti kondisi yang terjadi saat ini bahwa program RESPEK, PNPM dan BLT menyebabkan konflik dalam masyarakat (walaupun konflik yang terjadi tidak terlalu besar dan berdampak) namun tetap saja belum mengurangi dampak dari masalah kemiskinan. Sebab budaya

orang Papua memang budaya ketergantungan pada ketersediaan kebutuhan yang disediakan oleh alam.

E. Kesimpulan

Masalah kemiskinan di Papua meliputi dua hal yaitu kemiskinan secara budaya maupun kemiskinan secara terstruktur. Kemiskinan secara budaya merupakan suatu fenomena kemiskinan yang disebabkan oleh tradisi serta adat istiadat yang masih kuat dipertahankan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Sedangkan kemiskinan secara terstruktur disebabkan karena berbagai kepentingan kapitalis yang sering disebut sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

Antara kedua fenomena ini (kemiskinan budaya dan kemiskinan terstruktur) jika dibedakan maka menurut pikiran penulis bahwa kemiskinan terstruktur lebih dominan dalam menjembatani masalah kemiskinan di Papua. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan pembangunan yang sering berbenturan dengan pola budaya serta nilai-nilai tradisi orang Papua. Antara budaya dan sistem pengolahan sumber daya alam orang Papua keduanya merupakan suatu pola yang sangat terintegrasi dalam kehidupan sosial budaya sehingga budaya kemiskinan bukan merupakan suatu fenomena kemiskinan yang dominan di Papua.

Daftar Pustaka

Bdk. Tho Van den OFM, Frederika Korain SH, Adolf Kambayong OFM, *Memoria Pasionis di Tanah Papua*.

Bryan S. Turner, *Max Weber From History to Modernity*, the taylor and Francis e-Library, 2002.

Frans Magnis-Susens, *Pemikiran Karl Marx-Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*.

James Dingley, *Nationalism, Social Theory and Durkheim*, Palgrave Macmilan, New York 2008.

Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Charles Scribner's Sons Published, New York 1968.

-----, *Essays in Sociology*, Oxford University Press, 1946.

P.J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas – Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2010

Socratesz Sofyan Yoman, *Suara Bagi Kaum Tak Bersuara*, Penerbit DEIYAI, Jayapura Papua, 2009.

Watory, Wenand, Ir. *Laporan Komisi F, Dalam Rapat Paripurna DPRP*, Jayapura, Maret 2007.